

TNI Bukan Alat Politik

Pengantar

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan menjelang pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 yang akan datang, isu "netralitas politik TNI" tampak semakin memanas. Presiden Jokowi berkali-kali menegaskan perintahnya kepada Pimpinan TNI/Angkatan agar "TNI tetap netral". Sementara para purnawirawan TNI mulai reaktif dan terfragmentasi pada konstestasi politik. Baik dalam proses pencolegan di DPRD, DPR dan DPD, maupun yang terjun "bermanuver" dalam dukung masing-masing kandidat capres/wacapres 2019.

SEMENTARA itu pada pengarahannya kepada siswa Sesko TNI dan Sespimti Polri 23 Agustus 2018 di Istana Negara, Presiden Jokowi meminta "agar para perwira TNI dan Polri untuk membantu mensosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat". Ternyata arahan ini kemudian mendapat tanggapan pro dan kontra yang kritis dari publik.

Pihak yang pro berkilah bahwa "presiden masih dalam batas kewenangan dan kekuasaannya" mengajak para perwira TNI mendukung program kebijakan pemerintah. Sementara pihak yang kontra menilai bila "presiden telah menyalahgunakan kekuasaannya" terhadap perwira TNI untuk kepentingan politiknya.

Polemik "netralitas TNI" ini menarik untuk dijadikan refleksi, sekaligus tantangan yang dilematis bagi Presiden Jokowi dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat ini. Sehingga ke depan diharapkan sikapnya tidak sekadar formalitas dan retorika semata untuk menjaga konsistensi "netralitas politik TNI" tersebut. Lalu bagaimana sebaiknya komitmen TNI secara institusional diposisikan dalam menjalankan tugasnya dalam "perhelatan politik akbar" di negeri ini?

Reformasi Kultural TNI

Reformasi internal TNI yang dilaksanakan hampir dua dasawarsa ini secara faktual sudah banyak merespon dinamika tuntutan masyarakat. Saat ini pihak TNI masih terus berupaya melanjutkannya secara bertahap, meliputi baik aspek struktural maupun kultural. Upaya gradual ini bertujuan untuk mewujudkan postur TNI yang solid, handal dan profesional. Reformasi aspek struktural sudah dilaksanakan melalui pembenahan organisasi, doktrin, pendidikan dan latihan serta pemenuhan kesejahteraan prajurit. Meski demikian harus jujur diakui, reformasi struktural sulit diwujudkan secara optimal, bila tidak didukung oleh reformasi kultural.

Membangun kultur TNI yang demokratis sudah merupakan keputusan dari UU No.34/2004 tentang TNI. Ditandaskan bahwa TNI harus mengikuti "kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi,

supremasi sipil dan hak azasi manusia". Dengan demikian tuntutan profesionalisme TNI hendaknya diwujudkan dalam suatu kultur yang demokratis. Komitmen inipun sebenarnya sudah diupayakan sejak awal reformasi internal TNI dilakukan hingga sekarang. Hanya saja yang menjadi persoalannya adalah kelanjutan program penuntasan reformasi ini ada kala terhambat pada realisasi kelanjutan penataan kultur TNI.

Reformasi kultural dimaksudkan untuk mewujudkan karakter prajurit TNI yang profesional dan bermoral sesuai Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, Doktrin TNI serta ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak mudah diwujudkan begitu saja, karena konsekuensinya terletak pada perubahan tingkah laku prajurit TNI. Dalam UU TNI tersebut, ketentuan yang relevan menjadi ukuran bagi TNI untuk dapat membangun kultur yang demokratis adalah "prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis". Implikasi politisnya jelas menuntut posisi strategis TNI ke depan untuk menjaga "netralitasnya" sebagai alat Negara yang sah dalam pelaksanaan setiap proses demokrasi (pemilu/pilkada) di Indonesia.

Dengan demikian setelah reformasi internalnya berhasil diwujudkan, seyogyanya sudah menjadi konsensus nasional bahwa "TNI tidak akan pernah berpolitik kembali" seperti di masa Orde Baru. Dalam implementasi di lapangan sesungguhnya TNI secara kelembagaan telah menunjukkan kerelaan dan konsistensinya melaksanakan kebijakan "tidak berpolitik praktis" tersebut sampai sekarang ini. Oleh karena itulah sesungguhnya issue yang dikemukakan oleh berbagai pihak perlu diletakkan pada paradigma dan kepentingan nasional tersebut. Termasuk dalam menanggapi semua isu atau rumor politik yang "memanasi" Panglima TNI dan Presiden sepanjang tiga tahun masa Pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam kaitan ini, komitmen Presiden Jokowi, DPR dan masyarakat untuk mendorong "agar TNI benar-benar tidak berpolitik praktis lagi" perlu dikritisi terus. Hal krusial bagi TNI untuk meningkatkan keseriusannya menjaga komitmen ini, antara lain dengan pembuktian konsistensi "netralitas politik TNI" dalam setiap pemilu dan pilkada. Pembuktian ini jelas bermanfaat bagi pemahaman transisi kekuasaan dalam proses demokrasi pergantian pemerintahan di negara kita.

Demikian juga pembuktiannya dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Ahok dan rivalitasnya dalam pilkada DKI tahun 2017 yang lalu (apalagi salah seorang kandidat pesaingnya mantan Pamen TNI). Penekanan yang mengharuskan "netralitas politik TNI" ini, merupakan penjabaran doktrin TNI untuk selalu bersikap yuridis konstitusional dan lebih mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok politik.

Perlu dicatat sepanjang tiga setengah tahun terakhir banyak isu politik yang dialamatkan kepada TNI. Mulai dari komitmennya terhadap pemerintahan Jokowi-JK, profesionalisme prajurit, sikapnya terhadap upaya mengatasi teror, isu kembali berpolitik dalam revisi UU Pilkada, polemik Panglima

TNI dengan anggota DPR, isu "kemungkinan kudeta" sampai kepada isu "penyalahgunaan kekuasaan presiden terhadap TNI" yang disinyalir di berbagai media. Pertanyaan kritisnya apakah TNI akan melakukan tindakan "kudeta" (pengambilalihan kekuasaan secara paksa) di negara ini, bila kondisi keamanan nasional chaos akibat pemerintah gagal untuk mengatasinya? Apakah mungkin elite politik sipil yang menentang Presiden akan "memanfaatkan" TNI menggulingkan pemerintah? Atau kemungkinan sebaliknya "penyalahgunaan kekuasaan presiden" terhadap TNI?

Bukan Alat Kekuasaan

Sepanjang sejarahnya, TNI secara kelembagaan selama ini secara prinsip dinilai tidak berkeinginan kembali untuk berpolitik praktis. Apalagi disinyalir secara tendensius masih memiliki "tradisi kudeta ataupun pendukung makar", suatu hal yang kecil kemungkinannya. Karena sesuai dengan doktrinnya (Sumpah Prajurit dan Sapta Marga), TNI didirikan oleh "the founding fathers"-nya agar tetap setia pada ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945 dan NKRI serta pemerintahan yang konstitusional.

Komitmen kesetiaan ini jelas telah dibuktikan oleh pimpinan TNI/angkatan dalam beberapa periode masa pemerintahan RI. Meskipun pada masa pemerintahan Orde Baru, TNI sempat "terpolitikasi" dari koridor doktrinya, ternyata naluri berpolitik para perwira tidak sampai tergoda pada "upaya kudeta". Malahan di akhir pemerintahan Orde Baru dan di masa awal era Reformasi, TNI tidak "tergoda" menggunakan peluang yang ada untuk melakukannya (menyikapi kasus lengsernya Presiden Suharto dan Presiden Abdurrahman Wahid).

Terakhir Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo) dihadapkan kembali dengan panggilan tugas dalam ketegasannya mengantisipasi keamanan DKI Jakarta pada saat aksi-aksi demo ormas Islam yang sempat memanas dua tahun terakhir akibat provokasi sebagian pihak. Dalam kegentingan ini kembali ditegaskan oleh pimpinan TNI dengan gamblang bahwa "TNI menjadi Garda Terdepan" untuk menindak siapapun yang bertindak anarkhis pada saat demo tersebut. Beliau juga menandaskan bahwa Prajurit TNI adalah "Patriot Sejati" yang Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan "Benteng Terakhir" bagi keutuhan NKRI!

Keteguhan komitmen TNI ini tentunya sangatlah tepat, baik secara doktrinal ideologis maupun secara yuridis konstitusional. Khusus dalam menyikapi isu "kudeta atau makar", baik yang dituduhkan kepada elite politik sipil yang mungkin saja "bersikap kritis dan antipati" terhadap pemerintahan sekarang, maupun yang "dibiarkan" kepada TNI, perlu adanya tanggapan dan sikap arif dari Presiden RI dan Panglima TNI. Untuk itulah dalam menyikapi setiap kemungkinan "blunder politik" yang memanas pada setiap menjelang ada aksi demo ataupun hiruk pikuk isu dan rumor yang memojokan TNI menjelang dan selama pilkada/pemilu, Pres-

iden RI dan Panglima TNI tertantang untuk secara tepat dan hati-hati memosisikan TNI pada pendiriannya yang "selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam esensi pemahaman ini diharapkan bahwa TNI secara kelembagaan harus menyadari dirinya bukanlah sekadar sebagai "alat politik" pemerintahan yang berkuasa saat ini (dengan dukungan koalisi politik yang oligarkis, pragmatis dan spekulatif). Tetapi secara ideologis dan yuridis konstitusional sedari awal pendiriannya, TNI merupakan "alat negara" yang implementasinya dalam konteks "kontrol demokratis" oleh supremasi sipil (democratic control under civilian supremacy), (lihat Samuel P. Huntington, 1957 dan dimodifikasi secara konseptual oleh Andrew Cottey, dkk, 2002).

Sebagai pembuktian pertama untuk meneguhkan "TNI sebagai alat negara" adalah konsistensi sikap ini bertumpu pada sikap "kenegarawanan" para pemimpin TNI untuk tegas menolak "kudeta atau makar" bagi pemerintahan yang konstitusional. Kedua, hal faktual sensitifitas politik ke depan, mengingat saat ini secara resmi Presiden Jokowi kembali tampil sebagai Capres pada Pilpres 2019 yang akan datang. Tantangan krusial yang dilematis muncul dari sikap dan komitmen Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI (yang dianggap publik memiliki "kedekatan khusus" dengan Presiden Jokowi) untuk benar-benar dapat menjaga "netralitas politik TNI". Dalam hal ini hendaknya juga Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dapat menunjukkan sikap kenegarawanannya secara konsisten untuk "meneguhkan netralitas politik TNI" tersebut.

Adanya opini sebagian pihak yang masih terus bersikap apriori pada "keberadaan TNI" yang seolah-olah masih berpotensi "kembali berpolitik" atau "tidak netral", sesungguhnya tidaklah perlu terlalu didramatisasi. Justru yang sangat dikuatirkan penulis adalah kemungkinan bila elite partai politik terlalu jauh "bermanuver" berniat merusak soliditas TNI, dengan menjerumuskannya pada "pengambilalihan atau penggulingan kekuasaan pemerintah yang sah secara yuridis konstitusional". Atau sebaliknya dikuatirkan bila presiden (atas dukungan koalisi pendukungnya) malahan juga bisa menjerumuskan TNI dalam penyalahgunaan kekuasaan bagi kepentingan politiknya.

Oleh karena itu komitmen TNI untuk "tetap netral dalam setiap pelaksanaan pilkada/pemilu" pada tahun-tahun politik ini (2018 dan 2019), hendaknya agar didukung secara obyektif oleh semua pihak, termasuk pihak pimpinan pemerintah, pimpinan parpol dan DPR (objective civilian control, Samuel P. Huntington, 1957). Dengan kata lain diharapkan perlu adanya sikap yang arif dan konsisten dari penguatan otoritas sipil yang benar-benar "kapabel, demokratis, adil, tidak korup dan menjunjung tinggi hukum" sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. *** (Penulis adalah akademisi Universitas Pertahanan Indonesia dan alumnus magister Manajemen Pertahanan KSKN UI)